

Bangun Sinergi, Ciptakan Inovasi Pencegahan Korupsi

Dengan kerja sama, KPK bersama seluruh elemen bangsa terus membangun sinergi dan menciptakan inovasi dalam pencegahan korupsi. Misi pencegahan korupsi di berbagai area strategis telah menyelamatkan aset negara dan potensi kerugian dalam jumlah yang tidak kalah dengan aksi penindakan. Melalui perbaikan sistem, peningkatan transparansi serta akuntabilitas penyelenggara negara, koordinasi, supervisi, pendidikan dan kampanye antikorupsi, pencegahan korupsi pada periode 2015 – 2019 semakin memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik tanpa korupsi.

Membangun Kesadaran Antikorupsi

Mendorong Transparansi Penyelenggara Negara (PN)

Laporan harta kekayaan PN sebagai wujud transparansi, pengawasan, mencegah praktik suap, dan akuntabilitas PN.

93%

318 ribu dari **343 ribu** PN wajib lapor telah melaporkan harta kekayaannya di tahun 2019.



<https://elhkpnp.kpk.go.id/>

Menolak Gratifikasi

Rp 159,3 miliar
Total gratifikasi dalam bentuk uang dan barang yang diputuskan menjadi milik negara.



<https://gol.kpk.go.id/>

Menanam Budaya Antikorupsi

Memasukkan nilai antikorupsi pada mata pelajaran dan mata kuliah wajib umum di seluruh jenjang pendidikan.

Total SD, SMP, SMA **56.416**

Total program studi kampus **1.415**

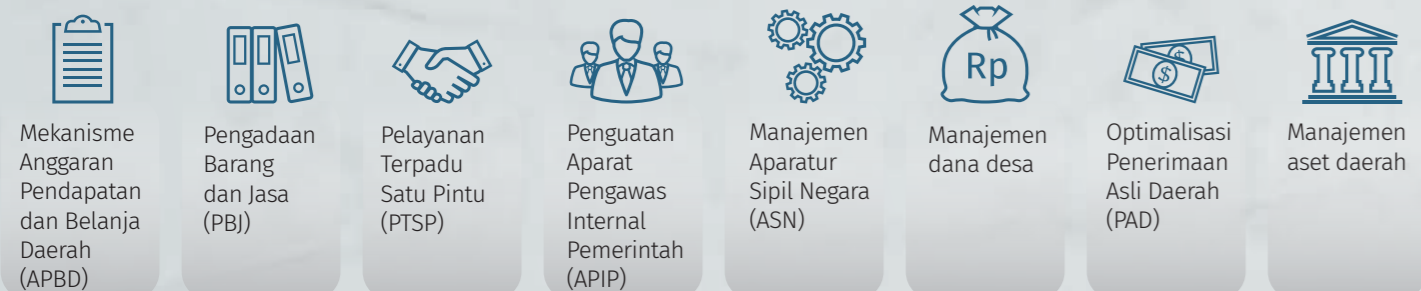
- Mencegah korupsi sektor bisnis dengan kerja sama Kadin dan asosiasi bisnis seluruh Indonesia.
- Mendorong peningkatan pendanaan partai politik dari **Rp 108** menjadi **Rp 1.000** persuara.
- Membangun Pusat Edukasi Antikorupsi.
- Membentuk Sistem Integritas Partai Politik (SIIPP), meliputi kaderisasi, rekrutmen, keuangan, kode etik, dan demokrasi internal parpol.

Menjawab Permasalahan Korupsi Pemerintah Daerah

Permasalahan

- Praktik kecurangan dari mulai perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dan jasa.
- Kasus suap dan pemerasan dalam pelayanan perizinan.
- Maraknya jual beli jabatan.
- Kerugian keuangan negara karena:
 - Lemahnya sistem pemungutan pajak.
 - Tidak jelasnya status kepemilikan aset daerah (pendataan).
 - Kurang memanfaatkan teknologi.

8 Rencana Aksi Pencegahan Korupsi



Solusi

- Mendorong dan mengawal E-planning, E-budgeting, E-procurement
- Mengawal perbaikan perizinan dari mulai pembuatan peraturan hingga penetapan perizinan daring.
- Peningkatan kapabilitas APIP.
- Mendorong tambahan pendapatan pegawai (TPP) hingga perbaikan manajemen dalam rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN.
- Mengawal manajemen aset daerah dan menggal sumber pendapatan asli daerah.

Pencegahan dilakukan ke **34 provinsi** termasuk **542 kabupaten/kota**

Seluruh Pemda harus berbenah pada 8 fokus kegiatan pencegahan korupsi.

Optimalisasi Pendapatan Daerah

- Penagihan piutang daerah **Rp 18,8 triliun**
- Melalui pemasangan alat rekam pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.
 - 9.109** alat rekam pajak dipasang
 - Pajak daerah meningkat **12,9 persen** atau setara dengan **Rp 930 miliar**



3 besar perkara tindak pidana korupsi 2015-2019



Rp 159 miliar

Gratifikasi Uang dan Barang

Rp 29 triliun

Optimalisasi Pendapatan Daerah dari pajak hotel, restoran; piutang pajak, fasum fasos, sengketa aset

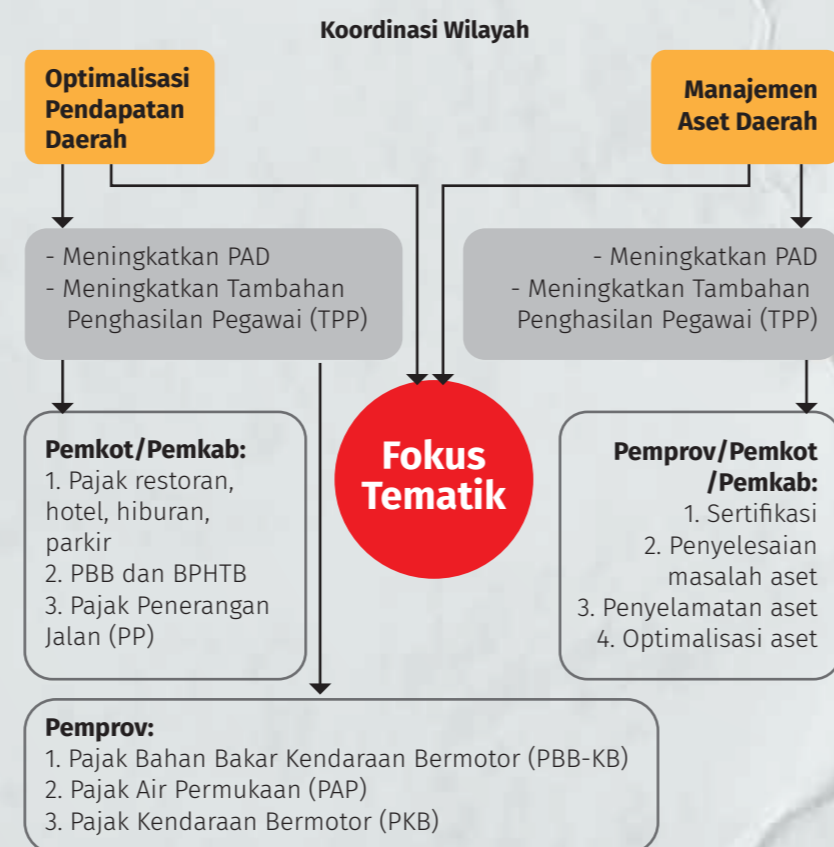
Rp 34,7 triliun

Potensi penyelamatan berdasarkan hasil Litbang

Rp 63,9 triliun

Total keseluruhan

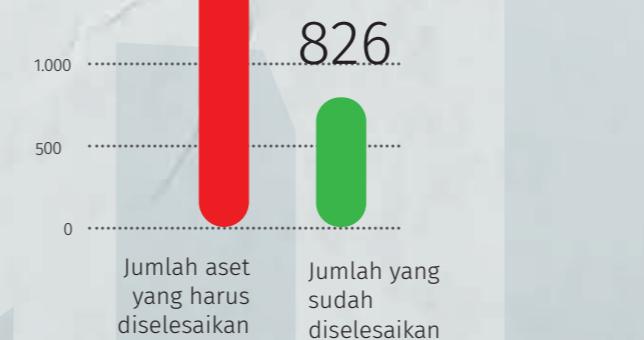
Tertibkan Aset, Optimalkan Pendapatan Daerah



Manajemen Aset Daerah **2.051**

1. Menagih Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum dan Fasos)
Mendorong Pemda untuk menagih Pengembang menyerahkan fasum dan fasos seperti jalan, taman, irigasi, pasar, RSUD, dan lain-lain kepada Pemda setempat.

Uang negara yang berhasil diselamatkan **Rp 4,4 triliun**



2. Mengawal Penyelesaian Sengketa Aset Daerah
- Konflik aset antara PT KAI di Kota Medan sebesar Rp 500 miliar.
- Aset gedung YTKI milik Kemenaker di Jakarta Rp 1,8 triliun.

Total penyelamatan keuangan negara **Rp 4,8 triliun**

KPK bantu mengembalikannya dengan cara fasilitasi kerja sama JamDatun dan BPN.

Grand Total Penyelamatan Uang Negara dari Manajemen Aset Daerah **Rp 9,2 triliun**

Benahi Negeri di Segala Lini

Melalui fungsi monitoring, KPK menemukan potensi dan risiko korupsi dari sistem kebijakan dan tata kelola dalam lembaga pemerintahan. Bersama dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, KPK menetapkan rencana aksi bersama untuk perbaikan sistem. Sejak KPK berdiri, lebih dari 2.000 rekomendasi diberikan untuk membenahi negeri. Rekomendasi tersebut diberikan dalam bentuk surat kepada Presiden dan Menteri untuk ditindaklanjuti. Tidak hanya itu, KPK memantau penerapan rencana perbaikan tata kelola administrasi pemerintah.



Pindai untuk berpartisipasi dalam pencegahan korupsi

<https://jaga.id>

Sektor Minyak dan Gas

Menambah 10 Persen Penghasilan Migas untuk Daerah melalui Revisi Regulasi



Pendapatan migas tidak ada.

Pada 2015, KPK menyurati Presiden untuk revisi Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2005.

Kini, daerah menikmati tambahan pendapatan 10 persen dari migas.

Sektor Pelayanan Publik (Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, dan Pemasarakatan)

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Penyelamatan keuangan negara tahun 2017 sebesar **Rp 147 miliar** dengan membantu Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan identifikasi dan penunggakan data **5 juta penduduk**.

2. E-catalogue Obat Generik

Pada 2017, KPK, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong rumah sakit pemerintah dan swasta untuk menggunakan e-catalogue dalam pengadaan obat generik. Kini pasar obat generik mencapai **Rp 18 triliun** dari semula Rp 5 triliun.

3. Tunggakan Iuran Wajib Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Daerah

1. Bekerja sama untuk menagih iuran wajib sebesar **Rp 114 miliar**
2. Revisi kebijakan pembayaran iuran wajib JKN dari Kementerian Keuangan langsung ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

4. Over claim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari RS



Overclaim **Rp 33 miliar** dari 4 rumah sakit (beda kelas).
KPK, Kementerian Kesehatan, dan BPJS meminta Pemerintah Daerah untuk merevisi sebanyak 853 rumah sakit. Potensi mengurangi defisit BPJS sebanyak **Rp 6 triliun**.

Sektor Keuangan Negara

- Menghentikan pemberian pembebasan bea masuk, pajak, dan cukai untuk barang konsumsi di Free Trade Zone (FTZ)
- Mencabut fasilitas bebas cukai rokok di FTZ
- Cegah kerugian negara sebesar **Rp 945 miliar**.



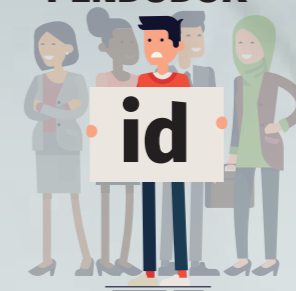
904 juta batang rokok Kuota rokok bebas cukai yang ditetapkan BP Tanjung Pinang sebesar 904 juta batang.

904 juta

7.000 orang. Jumlah kuota terlalu besar dibandingkan jumlah penduduk sehingga berpotensi muncul rokok ilegal.

Negara kehilangan potensi penerimaan **Rp 945 miliar**.

5 JUTA PENDUDUK



Identifikasi dan penunggakan data 5 juta penduduk terhambat karena Automated Biometric Identification System (ABIS).

?



Vendor (PT Biomorf Lone Indonesia) meminta tambahan biaya **Rp 147 miliar** karena kontrak habis.

+ Rp 147 M



KPK merekomendasikan untuk tidak membayar dengan pertimbangan hukum.

Sektor Pangan dan Sumber Daya Alam

1. Bisnis "Manis" dalam Gula Rafinasi

- KPK dan Kementerian Perdagangan memberhentikan upaya pembentukan pasar lelang gula rafinasi.
- Berpotensi mengurangi rente tambahan hingga **Rp 300 miliar**.

2. Tingkatkan Penerimaan Pajak Batubara

- Revisi Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk penagihan royalti batubara di Kalimantan Timur.
- Berpotensi meningkatkan penerimaan pajak batubara sebesar **Rp 400 miliar**.

3. Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (Non-CnC)

Menertibkan **7.115 IUP** yang tumpang tindih dengan IUP lain, perkebunan, dan hutan lindung.



4. Transparansi Produksi Hasil Hutan

- KPK dorong integrasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH)
- Berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp 3,4 triliun**.

SIPUHH.net

5. Maksimalkan Pajak Sawit

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan **67.546** Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas wajib pajak sektor kelapa sawit sejak tahun 2017.
- Pendapatan pajak sawit menjadi **Rp 11,9 triliun**.

